

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank Dunia dalam *Voice of Indonesia/VOI* (2021) mengemukakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke 12 dari 35 negara yang paling rawan bencana. Diperkirakan lebih dari 40 persen penduduk Indonesia terancam dengan adanya risiko ini. Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh ulah manusia (*man-made disaster*). Indonesia adalah negara yang rawan bencana karena letak geografisnya yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB (2021) menyampaikan bahwa Indonesia juga memiliki lebih dari 100 gunung berapi aktif yang dapat menyebabkan erupsi sewaktu-waktu. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian besar baik materiil maupun non-materiil.

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan (BNPB, 2021).

Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Potensi bencana lain yang tidak kalah seriusnya adalah faktor keragaman demografi di Indonesia. Di Indonesia terdapat empat kluster kebencanaan, yaitu geologi dan vulkanologi (letusan gunung api, gempa bumi, & tsunami); hidro-meteorologi I (kebakaran hutan, kekeringan); hidro-meteorologi II (banjir bandang, longsor, abrasi pantai); dan bencana non-alam (limbah, epidemik, gagal teknologi) (BNPB, 2021).

Bencana-bencana yang terjadi di Indonesia menimbulkan kerusakan besar bagi lingkungan, infrastruktur, dan masyarakat. Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara rawan bencana karena letak geografisnya yang berada di pertemuan lempeng tektonik dan cincin api Pasifik (Rizky, Fahreza, 2021). Berikut merupakan data kejadian bencana yang terjadi sejak 2020-2024:



Gambar 1.1 Jumlah Bencana yang terjadi di Indonesia 2020-2024

Sumber: <https://dibi.bnpb.go.id/>

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa cukup banyak kejadian bencana yang terjadi di Indonesia. Melihat potensi bencana yang ada bahwa Negara Indonesia termasuk Negara rawan bencana.

Sistem Penanggulangan Bencana (PB) di Indonesia didasarkan pada kelembagaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penanggulangan bencana dilaksanakan oleh satuan kerja-satuan kerja yang terkait. Dalam kondisi tertentu, seperti bencana dalam skala besar pada umumnya pimpinan pemerintah pusat/daerah mengambil inisiatif dan kepemimpinan untuk mengkoordinasikan berbagai satuan kerja yang terkait. Pedoman, peraturan, dan undang-undang PB membentuk sistem penanggulangan bencana yang mengatur kelembagaan, penyelenggaraan, tata kerja, dan mekanisme, serta pendanaan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, sistem penanggulangan bencana nasional Indonesia berusaha untuk melakukan penanggulangan bencana yang tepat. Dalam sistem pengelolaan bencana, dari tingkat nasional hingga daerah, hukum, peraturan, kelembagaan, perencanaan, penyelenggaraan PB, dan pengelolaan sumber daya dan pendanaan telah berubah secara signifikan sejak keluarnya undang-undang tersebut. Undang-undang ini mengatur bahwa penanggulangan bencana dilakukan pada tiga tahap, yaitu tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Penanggulangan bencana di Indonesia mengadopsi berbagai pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Salah satunya adalah pendekatan pencegahan yang melibatkan identifikasi dan mitigasi risiko bencana melalui perencanaan tata ruang, pemetaan zona-zona rawan bencana, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana. Pendekatan penanggulangan bencana harus bersifat

komprehensif, koordinatif, partisipatif, dan adaptif (Rencana Induk Penanggulangan Bencana, 2015). Komprehensif berarti melibatkan semua aspek yang terkait dengan bencana, seperti sosial, ekonomi, lingkungan, politik, hukum, dan budaya. Koordinatif berarti memastikan kerjasama antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Partisipatif berarti mengikutsertakan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek dalam penanggulangan bencana, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mereka. Adaptif berarti mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan perubahan yang terjadi akibat bencana, serta belajar dari pengalaman dan pelajaran yang diperoleh.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Tahun 2024, Doni Monardo menyatakan program penanggulangan bencana di Indonesia bukan program yang dapat berdiri sendiri, karena menyangkut dimensi sosial-kemasyarakatan (Hafidz, 2021). Jika program penanggulangan bencana hanya bersifat proyek, bukan jangka panjang, dan tidak melibatkan masyarakat maka tidak akan membawa dampak apapun. Oleh karena itu, pemerintah melakukan program pencegahan berbasis komunitas, melibatkan kebijaksanaan lokal di masyarakat sekitar. Upaya pendekatan kesejahteraan juga dilakukan dengan membuat program jangka panjang dengan mengembangkan potensi-potensi lokal.

Penanggulangan bencana berbasis masyarakat (PBBM) merupakan pendekatan yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam upaya mitigasi, respon, dan pemulihan pasca-bencana (Susanti, 2022). Pendekatan ini mengakui

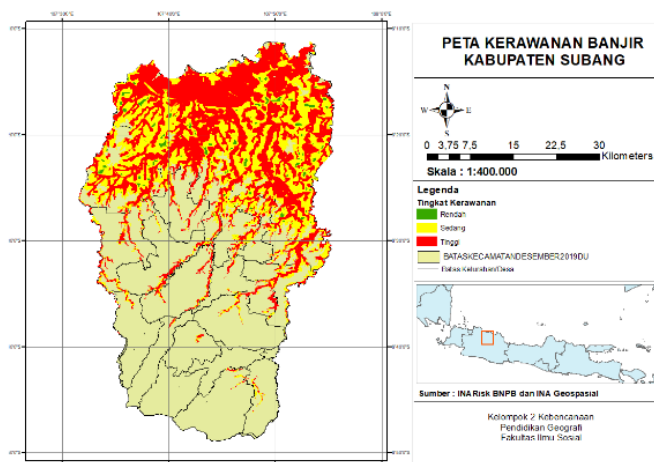
bahwa masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang penting tentang ancaman bencana, sumber daya, dan kebutuhan mereka sendiri. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program penanggulangan bencana.

Pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama dengan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran akan risiko bencana, melatih keterampilan tanggap darurat, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana (Herawati, Susetya,dkk., 2023). Program-program ini dapat mencakup pendidikan bencana di sekolah-sekolah, penyuluhan kepada kelompok masyarakat, pelatihan keterampilan tanggap darurat, dan pembentukan kelompok relawan bencana di tingkat lokal.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sering mengalami bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan kebakaran hutan. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sebaran jumlah kejadian bencana pada tahun 2023 berdasarkan provinsi menempatkan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah kejadian bencana terbanyak yaitu 843 kejadian. Bencana-bencana tersebut telah menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa yang tidak sedikit. Jawa Barat memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Sebagian besar wilayahnya berada di jalur pegunungan vulkanik yang aktif, sehingga rentan terhadap gempa bumi dan erupsi gunung berapi. Selain itu, curah hujan yang tinggi dan pola penggunaan lahan yang tidak sesuai juga meningkatkan potensi banjir dan tanah longsor.

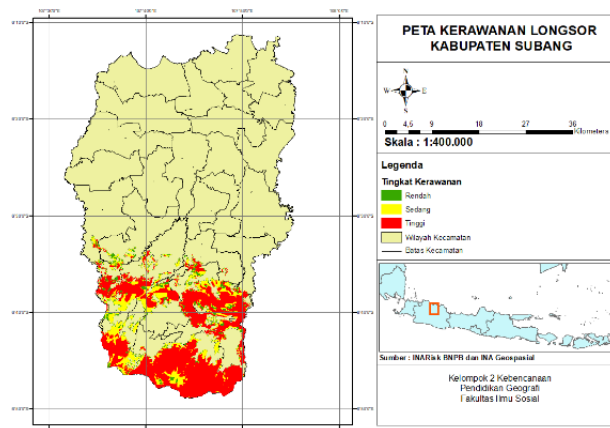
Kabupaten Subang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki topografi yang beragam dan menarik dengan potensi bencana yang melimpah. Pada tahun 2023, tercatat sejumlah 843 kejadian bencana di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah kejadian tertinggi adalah cuaca ekstrim (326 kejadian), tanah longsor (185 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (152 kejadian), dan banjir (107 kejadian) (BNPB, 2023). Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023, Provinsi Jawa Barat memiliki indeks risiko 123,16 (sedang).

Kabupaten Subang memiliki berbagai potensi bencana. Kabupaten Subang memiliki daerah rawan bencana diantaranya daerah rawan letusan gunung berapi, daerah rawan gempa, banjir dan tanah longsor (Renstra BPBD Subang 2018-2023). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang pada tahun 2023 mencatat 112 kejadian bencana, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang mencatat 95 kejadian bencana. Kejadian bencana yang paling dominan pada tahun 2023 adalah banjir, dengan 45 kejadian, naik dari 35 kejadian pada tahun sebelumnya. Banjir ini menyebabkan kerusakan signifikan pada rumah-rumah warga, infrastruktur, dan lahan pertanian. Faktor-faktor penyebab banjir antara lain curah hujan tinggi, buruknya sistem drainase, serta alih fungsi lahan yang mengurangi daya serap tanah. Selain itu, tingginya sedimentasi di sungai-sungai dan penggundulan hutan juga berkontribusi terhadap peningkatan frekuensi banjir (BPBD Subang, 2024).



Gambar 1.2 Peta Kerawanan Banjir Kabupaten Subang  
Sumber: InaRisk dan InaGeospasial, 2023

Selain bencana banjir terdapat pula potensi bencana tanah longsor. Menurut data kejadian bencana di Kabupaten Subang Tahun 2023, Tanah longsor menjadi bencana kedua yang sering terjadi, dengan 30 kejadian pada tahun 2023, naik dari 25 kejadian pada tahun 2022 yang disebabkan karena curah hujan tinggi dan kontur tanah yang labil, tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut (BPS Subang, 2023).



Gambar 1.3 Peta Kerawanan Tanah Longsor Kabupaten Subang  
Sumber: InaRisk dan GeoSpasial, 2023

Untuk mengantisipasi bencana alam Pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Sosial melakukan antisipasi dengan membentuk enam Kampung Siaga Bencana (KSB) pada tahun 2015 salah satunya adalah di Kecamatan Cislak.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang pada tahun 2015, Yayat Sudrajat untuk mengantisipasi bencana perlu dilakukan konsolidasi dengan aparat kecamatan guna menginventarisasi logistik, armada dan pemetaan bila terjadi bencana (TD, 2015). Salah satu upaya untuk mengantisipasi bencana tersebut yaitu dengan membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB).

Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah sebuah tinjauan tentang atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat lokal dalam menghadapi bencana alam. Biasanya diterapkan di kampung-kampung yang rentan terhadap bencana seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor. Tujuan dari Kampung Siaga Bencana adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk merespon dengan cepat dan efektif saat bencana terjadi. Hal ini melibatkan penyuluhan, pelatihan evakuasi, perencanaan darurat, dan pengorganisasian komunitas dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana (Petunjuk Teknis KSB, 2011).

Melalui program Kampung Siaga Bencana (KSB), diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dalam melindungi diri mereka sendiri dan tetangga mereka saat terjadi bencana, serta lebih mampu dalam memulihkan diri dan membangun kembali setelah bencana tersebut berlalu. Program ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran akan risiko bencana dan memperkuat infrastruktur serta sistem perlindungan sosial di tingkat lokal (Susanti, 2022). KSB dalam pelaksanaannya dibantu oleh taruna siaga bencana, pekerja sosial masyarakat,

karang taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan warga setempat.

Salah satu desa yang telah menerapkan Program Kampung Siaga Bencana adalah Desa Sukakerti yang berada di Kecamatan Cisalak. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana terdapat dua syarat pembentukan Kampung Siaga Bencana yaitu termasuk daerah rawan bencana dan terdapat peran aktif masyarakat terkait kebencanaan. Berdasarkan hal tersebut syarat pertama memiliki kerawanan terhadap jenis bencana tertentu. Pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 23 Mei terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang yang menewaskan lima korban jiwa, puluhan rumah rusak dan ratusan warga diungsikan ke tempat aman. Hal ini menandakan bahwa desa Sukakerti memiliki potensi terjadinya Bencana. Hal ini juga didukung melalui keterangan Tatang melalui wawancara saat peninjauan awal, Anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Subang yang menyatakan bahwa ketika musim kemarau ancaman bencananya berupa kebakaran hutan dan lahan, jika di musim penghujan bisa longsor dan juga banjir bandang. Kemudian, syarat kedua yaitu adanya peran aktif masyarakat, berdasarkan wawancara kepada anggota Tagana Kiwong saat peninjauan awal, bahwa pembentukan KSB di desa Sukakerti didasarkan pada masyarakat melalui Pemerintah Desa di tahun 2023 yang menginginkan adanya program penanggulangan bencana di desa Sukakerti.

Penelitian yang dilakukan Mutiara Dimaputri, Asha dan Mujahidin (2023) ini berjudul "Optimalisasi Kampung Siaga Bencana dalam Mitigasi Bencana di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur". Dalam penelitian ini, metode

kualitatif digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menyadari alasan di balik pendirian KSB melalui dimensi objektif. Masyarakat tidak menyadari beberapa jenis mitigasi bencana yang tersedia saat ini. Berdasarkan dimensi alternatif keputusan tersebut, Dinas Sosial Kota Balikpapan memutuskan untuk mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program KSB, mengingat banyaknya KSB yang telah didirikan. Program KSB mengoptimalkan kendala keuangan, bangunan dan infrastruktur yang tidak memadai, dan sumber daya manusia terutama tenaga kerja dengan keahlian dalam bantuan bencana semuanya merupakan bagian dari dimensi sumber daya. Singkatnya, meningkatkan kesiapsiagaan bencana masyarakat dapat mengurangi dampak bencana di Kota Balikpapan.

Lebih lanjut, KSB Tunas Bangsa memiliki tingkat kemahiran yang terhormat dalam menangani logistik dan korban bencana alam, menurut penelitian "Eksistensi Kampung Siaga Bencana (KSB) Tunas Bangsa dalam Penanggulangan Korban Bencana Alam" yang dilakukan oleh Cahyono, SAT (2019). Tetapi ada masalah dengan logistik, penyimpanan yang tepat, dan kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya, harus ada bimbingan teknis tentang manajemen logistik KSB.

Ketiga, kajian Amran (2016) tentang "Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor melalui Kelompok Kampung Siaga Bencana". Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan tingkat keterlibatan masyarakat dalam menurunkan bahaya bencana. Indikator partisipasi yang lebih besar termasuk pergeseran perilaku masyarakat, seperti pembentukan

Desa Kesiapsiagaan Bencana, pelaksanaan inisiatif penanggulangan bencana, keinginan penduduk setempat untuk terlibat dalam acara, kolaborasi antar tetangga, dan pelestarian lingkungan. Pelaksanaan kegiatan masyarakat dan keberlanjutan adalah area yang perlu difokuskan oleh pemerintah daerah untuk menjamin bahwa masyarakat dapat secara mandiri menangani masalah di tingkat bawah.

Studi "Implementasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis Masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang" yang dilakukan oleh Pangestu, SD dan Fedryansyah (2023) juga merinci keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan mitigasi bencana alam berbasis KSB di Desa Cihanjuang. Hal ini ditunjukkan dengan cara bahwa sumber daya manusia lokal, prosedur lokal, budaya lokal, pengetahuan lokal, dan keterampilan lokal digunakan untuk melaksanakan berbagai aspek masyarakat. Di sisi lain, upaya mitigasi bencana alam berbasis masyarakat KSB di Desa Cihanjuang

Berdasarkan keempat penelitian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang dilakukan dengan lokasi dan tujuan yang sama yaitu, "Implementasi Penanggulangan Bencana berbasis Masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang". Penggunaan teori yang berbeda juga digunakan oleh peneliti. Penelitian ini baru karena dilakukan di tempat yang belum pernah diteliti terkait dengan program Kampung Siaga Bencana: Desa Sukakerti, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Selain itu, peneliti menggunakan aras pekerjaan sosial untuk melakukan penelitian dan membuat usulan program.

Pada tahap penjajakan untuk memperoleh gambaran awal penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui kampung siaga bencana di desa Sukakerti, peneliti melakukan wawancara awal kepada anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Subang. Anggota Tagana Kabupaten Subang menyatakan bahwa terdapat beberapa isu terkait dengan pelaksanaan Penanggulangan Bencana berbasis Masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana salah satunya adalah belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana dikarenakan komunikasi yang kurang baik antara masyarakat dan anggota Kampung Siaga Bencana maupun Pemerintah Desa dan terkendala pada keterbatasan anggota atau orang yang melaksanakan Kampung Siaga Bencana serta keterbatasan anggaran pelaksanaan program.

Selain itu, kampung siaga bencana di desa Sukakerti terbilang yang paling pasif dalam melakukan kegiatan karena tidak ada kegiatan yang dilakukan setelah pembentukan kampung siaga bencana pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar pihak terkait, kurangnya pemahaman atau motivasi dari masyarakat, atau minimnya sumber daya yang tersedia. Kurangnya kegiatan ini berpotensi mengurangi efektivitas program Kampung Siaga Bencana dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Berdasarkan hal tersebut, Tinjauan tentang yang diangkat berkaitan dengan Implementasi Penanggulangan Bencana berbasis Masyarakat yang dilakukan melalui Program Kampung Siaga Bencana yang baru terbentuk sejak bulan september tahun 2023. Sejalan dengan fenomena yang disampaikan oleh anggota Taruna Siaga Bencana

tersebut bahwa aspek kriteria pengukuran Implementasi menurut Edward III (1980) adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui secara lebih jelas tentang implementasi Penanggulangan Bencana berbasis Masyarakat melalui Kampung Siaga bencana secara riil di Lapangan dengan Lokasi Penelitian dan Teori yang berbeda. Maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian mendalam pada wujud penelitian dengan judul “Implementasi Penanggulangan Bencana berbasis Masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka peneliti merumuskan permasalahan “Bagaimana Implementasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang?” dengan sub problematik sebagai berikut:

1. Bagaimana Karakteristik Infoman?
2. Bagaimana proses komunikasi pelaksanaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang?
3. Bagaimana sumber daya yang dimiliki dalam program penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang?

4. Bagaimana proses disposisi program penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang?
5. Bagaimana struktur birokrasi program penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang Implementasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang ditujukan untuk memperoleh gambaran empiris tentang:

1. Karakteristik Informan.
2. Proses komunikasi pelaksanaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.
3. Sumber daya yang dimiliki dalam program penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.
4. Disposisi yang dilaksanakan pada program penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.
5. Struktur birokrasi yang dimiliki pada program penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya serta dapat menjelaskan Implementasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Melalui Kampung Siaga Bencana di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Hasil Penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

##### **2. Manfaat Praktis**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, saran dan masukan bagi masyarakat, pemerintah dan lembaga/instansi terkait dalam menjalankan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Melalui Kampung Siaga Bencana di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Sebagai suatu rujukan dalam usaha meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Implementasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Melalui Kampung Siaga Bencana di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian Implementasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Melalui Kampung Siaga Bencana di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang disusun berdasarkan sistematika penulisan proposal sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat konsep dan teori yang relevan meliputi hasil penelitian terdahulu dan kajian tentang implementasi, bencana, penanggulangan bencana berbasis masyarakat, konsep Kampung Siaga Bencana, praktik pekerjaan sosial dengan komunitas dan pekerjaan sosial dengan kebencanaan.

**BAB III METODE PENELITIAN**, mencakup desain penelitian, penjelasan tentang penelitian yang dilakukan, latar belakang penelitian, sumber data dan cara penentuan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, mencakup analisis dan deskripsi hasil penelitian, serta pembahasan mengenai implementasi Penanggulangan Bencana berbasis Masyarakat melalui Kampung Siaga Bencanadi Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang yang telah dilakukan oleh peneliti.

**BAB V USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi pemangku kepentingan yang terlibat serta penelitian lanjutan.